

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dilakukan pada bab II maka dapat diambil sebagai berikut:

1. Telah terjadi diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil terbukti Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa “tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
2. Telah terjadi pertentangan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 A ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, dan adanya pertentangan Pasal 6 huruf c Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2009 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Adanya pertentangan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menimbulkan dampak ketidakpastian hukum bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya revisi terhadap isi Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil karena Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2009 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
2. Perlu adanya penyampaian informasi kepada mantan warga binaan pemasyarakatan terkait adanya pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Yogyakarta untuk mantan warga binaan pemasyarakatan agar mantan warga binaan pemasyarakatan dapat kembali siap bekerja ditengah – tengah masyarakat layaknya masyarakat pada umumnya.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Andi Hamzah., 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi.*,PT. Pradnya Paramita., Jakarta., hlm. 61.

Bambang Poernomo., 1996. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.*Liberty, Yogyakarta.

Hartini., SH., M.H., 2008. *Hukum Kepegawaian.*, PT. Grafika., Jakarta., hlm. 31.

MG. Endang Sumiarni., *Hand Out Bahan Ajar Metodologi Penulisan Hukum.* 2014.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

Peter Marzuki., 2005.,*Penelitian Hukum.*, Kencana., Jakarta., hlm. 139.

Sears Freedman., dan Peplau., 1999. *Diskriminasi dan Masyarakat.*, Jayapura, hlm.10.

Subhandi Handar., 1975 *.Keadaan Narapidana Dan Keprihatinan Masyarakat.*, Surabaya., hlm. 45.

### Koran:

Haluan Kepri., hari Jumat 9 November 2012.

### Web:

<http://kemendagri.go.id>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2015.

<http://m.news.viva.co.id>, diakses pada tanggal 31 September 2014.  
<http://mediainformasill>, diakses pada tanggal 16 September 2015.  
<http://vivanews.co.id>, diakses 16 September 2015.  
<http://www.dpr-kepriprov-go.id>, diakses tanggal 9 September 2015.  
<http://www.hukumonline.com>, diakses pada 31 September 2014.  
<http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2015.  
<http://www.kompasiana.com/>, diakses pada tanggal 16 September 2015.  
<http://www.linggapos.com>, diakses tanggal 9 September 2015.  
<http://www.pendaftarancpns.com>, diakses 31 September 2014.  
<http://www.tribunpontianak.co.id>, diakses pada tanggal 31 September 2014.  
<http://www.vivanews.com>, diakses tanggal 9 September 2015.  
<http://tribunnews.com>, diakses pada tanggal 23 September 2014.  
<http://www.rutanparigi.co.id>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2015.  
<http://mediainformasi.com>, diakses pada tanggal 16 September 2015.

Peraturan Perundang –undangan :

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 12 Tentang Pemasarakatan.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4.192. Sekretariat Negara. Jakarta.